

MENANAMKAN DAN MENUMBUHKAN KECINTAAN KEPADA NEGARA DAN BANGSA UNTUK MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA *

Firdaus LN

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau,
Kampus Binawidya Km 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Telp. 0761-63267, Faks. 0761-65804*

Pembuka

"Nenek Moyangku Orang Pelaut. Gemar mengarungi luas samudra". Sepenggal lagu anak-anak ini pada tahun 1960-an sering dinyanyikan oleh anak-anak Sekolah Ra'yat. Sesiapa saja yang mendengar dan meresapinya dalam-dalam, niscaya akan timbul rasa kebanggaan sebagai Anak Bangsa terhadap nilai perjuangan yang sanggup mempersatukan kita hari ini. Kenapa narasi tersebut sanggup menggetarkan semangat persatuan kita? Macam-macam penjelasan yang mungkin. Satu diantaranya, boleh jadi karena ianya mengandung nilai-nilai perjuangan suci Nenek Moyang kita dalam membangun Tamadun Nusantara yang maju dan bermarwah.

Seiring dengan "ke daratnya" orang, lagu yang mengingatkan kita sebagai bangsa bahari ini mulai jarang dinyanyikan. Artinya orang sudah mulai melupakan akar budayanya. Wawasan Nusantara memandang laut sebagai satu keutuhan wilayah, dengan darat udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Jadi, ketika orang mulai "menjauhi" laut, maka mulai terpisahlah bangsa ini. Padahal melihat sejarah penyebarannya, mayoritas sukubangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari satu induk, yaitu rumpun Austronesia (Bambang Budi Utomo, 2007).

Kini, nuansa kebanggaan itu agaknya semakin kurang berkesan di hati anak bangsa. Kenapa bisa begitu? Boleh jadi karena ramai anak bangsa ini sudah merasa muak dengan perangai yang saban hari mereka dengar, tonton, bahkan yang mereka alami dan rasakan sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan atmosfir yang pengap dengan kemunafikan, korupsi, tak adil, bertele-tele dan masih banyak lagi yang menyakitkan hati.

Walhasil banyak muncul sumpah serapah masyarakat sebagai buah sakit hati. Inilah biang keladi kian mudarnya semangat persatuan dan kesatuan Bangsa yang kontras dengan semangat Wawasan Nusantara, sehingga semakin jarang orang hendak mengungkit-ungkit soal kebesaran nilai yang mempersatukan kita itu. Apatah lagi masa lalu tidak akan mengubah nasib bangsa kita hari ini. Kebanyakan manusia Indonesia hari ini lebih memetingkan keselamatan diri sendiri dan kelompoknya ketimbang persoalan bangsa yang sarat dengan konflik tak berkesudahan.

Makalah ini diracik untuk mengetuk pintu hati nurani setiap anak bangsa Indonesia sempena Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 sehingga mencuat kesadaran kolektif cinta tanah air sebagai tanah tumpah darah yang melahirkan dan membesarkannya.

*) Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema "Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.

Memudarnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa

Nilai pencerahan dari peradaban Bahari yang diwariskan oleh Nenek Moyang kita melalui perjuangan tiada mengenal lelah ini-- seakan-akan tak bergeming oleh euphoria anak negeri yang gemar mengambil milik orang lain bukan haknya. Fenomena ini secara kasat mata dapat diteroka dari kecendrungan perilaku anak bangsa yang paradoksal. Kebesaran Nilai-nilai Budaya Bahari Nusantara semestinya membuat anak bangsa ini insyaf dan lebih arif dalam bertindak melalui laku "*Merangkai Pulau, Memakmurkan Negeri*", bukan sebaliknya "*Menjual Pulau, Meluluhlantakkan Negeri*", apatah lagi "*Mencerai-beraikan Pulau, hendak berpisah dengan NKRI*". Berbagai *assessment* yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum mampu mengembangkan *Good Governance* (Sofian effendi, 2005; Muhammad Ray Akbar, 2008; Djoko B, 2008; Suka Hardjana, 2008).

Istilah "Koruptor" sudah menjadi hal yang biasa, bukan lagi sebuah "Aib" seperti disindir oleh Budayawan Taufiq Ismail melalui penggalan Puisi yang dibacakan dalam Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki 1425H :

***"Penamaan koruptor sudah tidak menggigit lagi kini.
Istilah korupsi sudah pular dalam arti***

***Lebih baik kita memakai istilah maling.
Maling ini adalah kawan anai-anai dan rayap sejati. Dan lihat
kini jendela dan pintu rumah Indonesia dimakan rayap.***

***Kayu kusen, tiang, kasau rumah Indonesia dimakan anai-anai.
Dinding dan langit-langit, lantai rumah Indonesia digerogoti rayap.
Tempat tidur dan lemari, meja kursi dan sofa, televisise rumah Indonesia
dijarah anai-anai.***

***Pagar pekarangan, bahkan fondasi dan atap rumah Indonesia
sudah mulai habis dikunyah-kunyah rayap.***

Rumah Indonesia menunggu waktu, masa robohnya yang sempurna."

Djoko Pramono (2005) sangat prihatin dengan kondisi masih terbatasnya pemahaman maupun pemanfaatan khasanah kekayaan kebaharian Nusantara. Penelusurannya terhadap unsur-unsur kekuatan laut seperti letak geografis, bangun muka bumi, luas dan setting wilayah, budaya komunitas pesisir, dan faktor institusional membawanya pada sebuah kesimpulan bahwa kemunduran kehidupan kebaharian kita disebabkan oleh faktor-faktor internal, seperti konflik, intrik, dan keserakahan antar berbagai unsur internal. Penelusuran Adrian B. Lopian (2008) terhadap jejak penduduk Nusantara dengan budaya maritimnya mampu membawa kita mengenali budaya maritim dan pasang surut suatu episode penting zaman Bahari di Indonesia dengan *Enterprising Spirit* yang memukau. Perkara benci kepada sesuatu adalah urusan hati. Perkara cinta setengah mati juga urusan hati. Jadi, akar masalah kian memudarnya rasa cinta kepada negara dan bangsa pasti lah juga mesra hubungannya dengan rasa sakit hati anak bangsa ini.

*)
Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema "Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.

Budaya sebagai Teras Pembangunan Nasional

Sejak Orde Baru eksis, perhatian bangsa kita lebih tercurah pada upaya-upaya pemulihan ekonomi rakyat dalam pembangunan nasional. Itu tidak berarti bahwa pemerintah sama sekali tidak memperhatikan atau memikirkan bidang-bidang lain, termasuk sosial budaya sebagaimana dimaklumi Alfian (1986). Namun Budayawan Tenas Effendy (2000) mencermati bahwa pembangunan di masa silam nyaris tidak merujuk kepada kebudayaan. Bahkan kebudayaan hanya dijadikan salah satu sasaran pembangunan. Padahal seyogyanya, kebudayaan tidak hanya dijadikan sasaran pembangunan tetapi mesti menjadi Landasan Pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar pembangunan yang mencerminkan Nilai-Nilai Budaya Bangsa Bahari. Selama pembangunan ini tidak merujuk kepada kearifan budaya, maka selama itu pula kita akan sering berhadapan dengan aneka perilaku biadab yang mencuat akibat benturan nilai-nilai budaya tadi. Bahkan dalam skala yang lebih luas, Huntington (1996) menyatakan bahwa penyebab utama dan paling berbahaya dari munculnya konflik politik global adalah adanya benturan antarperadaban.

Budaya Melayu dalam Tamadun Bahari Nusantara

Indonesia merupakan Negara Kepulauan Terbesar di Asia Tenggara yang terletak pada posisi silang antara dua benua (Asia Daratan dan Australia) dan dua samudra (Samudra Indonesia dan Pasifik), dengan luas lautnya dua pertiga dari luas daratan. Eksistensi Negara Indonesia di posisi silang strategis itu mendedahkan suatu proses akulturasi yang membentuk Bangsa Indonesia seperti sekarang, baik dalam aspek religi, sosial budaya, maupun bahasa. Cara pandang Bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Bagi Indonesia, laut merupakan sumber kemakmuran, alat pemersatu Bangsa dan Negara yang menjadi tumpuan harapan, peluang menuju masa depan yang cemerlang, gemilang, dan terbilang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nenek Moyang Bangsa Indonesia sangat arif mewariskan pesan Kultural Bahari kepada anak cucunya:

"Kalau hidup hendak selamat,

peliharalah: Laut beserta Selat, Tanah berhutan lebat karena di situ terkandung:

Rezeki dan Rahmat, Tansil Ibarat, Aneka Nikmat, Beragam Manfaat, dan Petuah Adat".

"Tanda orang Berbudi Pekerti,

merusak alam ia jauhi", "tanda orang berakal budi, merusak hutan ia tak sudi",

"tanda ingat ke hari tua, laut dijaga bumi dipelihara", "tanda ingat ke hari kemudian, taat menjaga laut dan hutan".

Sejarah Indonesia juga mencatat bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Keanekaragaman budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Budaya suku-suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merupakan hamparan kekayaan budaya Indonesia. Wawasan Nusantara telah terbukti dapat mempersatukan Bangsa Indonesia melalui Kalung "*Bhinneka Tunggal Ika*". Namun kenapa dalam perkembangan terkini, terutama di era otonomi daerah cenderung mengancam keutuhan NKRI yang mengarah kepada tumbuhnya *Chauvinisme* Kedaerahan?

^{*)} Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema "Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.

Padahal UUD NKRI 1945 melalui Pasal 32 secara tegas menyatakan. “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi erosi semangat kebangsaan yang bernilai luhur. Dijelaskan pula bahwa kebudayaan Lama dan Asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia diperhitungkan sebagai Kebudayaan Bangsa.

Koentjaraningrat (1974) mendefinisikan budaya sebagai “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar”. Merujuk pada konsepsi budaya tersebut, nilai-nilai Budaya Bahari Nusantara akan lebih mudah digali dari tapak-tapak Budaya Melayu dalam Tamadun Bahari Nusantara yang *nota bene* menjadi pionir mengarungi Kepulauan Nusantara. Parsudi Suparlan & Budhisantoso (1985) mengemukakan bahwa Orang Melayu merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang cukup besar jumlahnya dan sangat luas wilayah persebarannya. Ismail Hussein (2001) dari perspektif Tamadun Melayu menyongsong Abad Kedua Puluh Satu menegaskan bahwa Dunia Melayu itu selalu terbuka luas, laksana samudera lepas yang mengelilinginya, dan selalu menerima serta menyerap pelbagai unsur yang menyentuh pantainya, namun di samping itu tetap mempertahankan kepribadiannya yang unik.

Ada tiga wujud utama suatu kebudayaan yang dapat dijadikan situs penggalian nilai-nilai budaya (Koentjaraningrat (1974 H.S.); *pertama*, sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya; *kedua*, sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan *ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, ketiga wujud kebudayaan tersebut tidak terpisah satu sama lain, dan bahkan saling mengisi dan bertaut secara erat. Itulah sebabnya, Koentjaraningrat menyederhanakan rumusan kebudayaan sebagai “keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu”.

Dari wujud pertama kebudayaan, nilai-nilai Budaya Bahari dapat dikenal secara pasti melalui semua nilai-nilai tunjuk ajar Melayu yaitu segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh tauladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas (Tenas Effendy, 2004). Dari wujud kebudayaan yang kedua, nilai-nilai budaya Bahari Nusantara dapat ditemukannya dari bukti dan fakta prasejarah Indonesia bahwa Nenek Moyang Bangsa Indonesia adalah Asli Bangsa Pelaut atau pengembara (Adrian B. Lopian, 2008). Mereka sejak ribuan tahun Sebelum Masehi ternyata sudah mampu mengarungi dunia sebagai pelaut-pelaut ulung yang kebudayaannya masih dapat dilacak sampai saat ini. Berbagai kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Nusantara pada umumnya juga memiliki dasar nilai-nilai kebudayaan kebaharian (H.S. Umar, 1986; Djoko Pramono, 2005). Temuan terhadap beraneka ragam Teknologi Bahari (Mughtar Ahmad, 1986, 2004; Suwardi MS, 1986; Husni Thamrin, 2003; Djoko Pramono, 2005; Adrian B. Lopian, 2008) oleh masyarakat Melayu yang mendiami Kepulauan Nusantara memberikan sumbahan nilai-nilai Budaya Bahari yang sangat berharga sebagai wujud kebudayaan dalam bentuk benda-benda (artefak). Oleh sebab itu, para Sejarawan dan Antropolog mengatakan bahwa “Kebudayaan Melayu adalah Kebudayaan Bahari” (Tenas Effendi, 2000; Mughtar Ahmad, 1986, 2004).

Puncak Tamadun Bahari Nusantara ini adalah dijadikannya Bahasa Melayu Riau sebagai landasan bagi pengembangan Bahasa Nasional Indonesia (Parsudi Suparlan dan Budhisantoso, 1986; Suwardi MS, 2008). Mengapa Bangsa Indonesia memilih Bahasa Melayu Riau, suatu bahasa yang diucapkan oleh suku-bangsa minoritas yang tinggal di Daerah Riau dengan jumlah sekitar setengah juta jiwa saja dalam tahun 1930?; Kenapa

*) _____
Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema “Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.

Bangsa Indonesia tidak memilih Bahasa Jawa yang pakai oleh hampir 42 juta orang pada kurun yang sama? Jawaban politik resmi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah Bahasa Melayu Riau sebagai representasi *Lingua Franca* di wilayah Nusantara mengandung nilai-nilai “semangat solidaritas”, “kesetiakawanan”, dan “gotong royong” yang tinggi (Koentjaraningrat, 1986). Bila demikian adanya, maka upaya menghidupkan kembali (revitalisasi) nilai-nilai Budaya Bahari Nusantara dalam tata pemerintahan dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lain adalah upaya aktualisasi Wawasan Nusantara dalam mewujudkan *Good Governance*.

Nilai-nilai Budaya Bahari, Budaya kerja dan Good Governance

Pembukaan UUD 1945 menegaskan *dimensi spiritual* dari sistem administrasi negara kita, berupa pernyataan keimanan dan pengakuan kemahakuasaan Allah SWT dalam perjuangan bangsa (alinea tiga); serta cita-cita dan tujuan bernegara, dan sistem pemerintahan negara (alinea empat). Budaya Melayu Riau sebagai representasi Budaya Bahari Nusantara memiliki nilai-nilai spiritual luhur yang patut dan layak dimanfaatkan dalam mewujudkan *Good Governance*. Nilai-nilai Budaya Bahari tersebut ternyata memiliki kesetaraan dengan Anasir dalam *Good Governance* seperti disenaraikan dalam tabel berikut:

Item	Anasir Good Governance (Mudrajat Kuncoro, 2004)	Nilai-nilai Budaya Bahari (Tennas Effendy, 2003)
1	Partisipasi; mendorong semua warga Negara mengekspresikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung.	<i>Kemajemukan Persebatian Tenggang Rasa Kegotong-royongan Senasib-sepenanggungan Musyawarah dan Mufakat Rela berkorban</i>
2	Penegakan Hukum; menjaga agar penegakan hukum dan perundangan adil dan tanpa diskriminasi, serta mendukung HAM dengan memperhitungkan semua nilai yang ada dalam masyarakat.	<i>Taqwa Kepada Allah Amanah</i>
3	Transparansi; membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang dibutuhkan & akses informasi yang mudah bila dibutuhkan.	<i>Keterbukaan</i>
4	Responsif; menggunakan responsitas birokrat terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat tanpa kecuali.	<i>Pemurah Sabar Lapang dada rendah hati suka mengalah,</i>
5	Pemerataan; member peluang yang sama bagi semua warga untuk meningkatkan kesejahteraan.	<i>Adil dan Benar tidak serakah</i>

*)
Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema “Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 9 November 2011.

6	Visi Strategik; memformulasikan sutau strategi yang didukung dengan system penganggaran yang mencukupi, sehingga rakyat punya rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap masa depan daerah.	<i>Berpandangan Jauh ke depan</i>
7	Efektivitas dan Efisiensi; melayani masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana.	<i>Hemat dan Cermat</i>
8	Profesionalisme; meningkatkan kapasitas, keterampilan dan moral birokrat daerah sedemikian rupa sehingga mereka dapat pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan dapat dijangkau.	<i>Rajin dan Tekun Memanfaatkan Waktu Ilmu Pengetahuan Kemandirian</i>
9	Akuntabilitas; meningkatkan akuntabilitas public bagi para pengambil kebijakan di pmerintahan, swasta, dan organisasi masyarakat pada semua bidang (politik, fiscal, anggaran).	<i>Bertanggungjawab Berani dan Tabah</i>
10	Pengawasan; melakukan control dan pengawasan atas administrasi public dan aktivitas pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.	<i>Malu Arif dan Bijak Tahu diri</i>

Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang majemuk sebagai punca dari sifat keterbukannya itu sehingga didatangi oleh berbilang kaum dan suku bangsa. Kemajemukan itu menumbuhkan wawasan yang luas sehingga ilmu pengetahuan pun berkembang. Sifat pluralistik Tamadun Bahari Nusantara ini memberi laluan bersebatinya aneka nilai budaya sehingga rancangan dan pelaksanaan pembangunannya bersifat dinamis, penuh alternatif. Dengan corak seperti itu, masyarakat dapat memberikan pilihan yang tepat sesuai dengan situasi, kondisi dan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Ismail Hussein (2001) secara arif mengakui bahwa Dunia Melayu itu penuh keragaman dari segi keagamaan, kebudayaan, kesenian serta adat resam, tetapi di bawah keragaman itu selalu terasa ada satu kesatuan yang mengikatnya. *Persebatian Melayu* hakikatnya adalah nilai "*persatuan dan Kesatuan*" yang menjadi asas dari terwujudnya kerukunan hidup antarmasyarakat, antarkaum, antarsuku, dan antarbangsa (Tenas Effendy, 2003). Nilai-nilai persebatian inilah (*kemajemukan, tenggang rasa, kegotong-royongan, senasip-sepenanggungan, musyawarah dan mufakat, dan rela berkorban*) yang memungkinkan kerjasama antar sesama anggota masyarakat tanpa memandang asal-usulnya. Nilai-nilai budaya Bahari ini dapat disimak melalui ungkapan adat: "*Elok rencana karena bersama, terkabul niat karena mufakat*", "*apabila kerja hendak bermanfaat, dahulukan dengan duduk mufakat*", "*apabila kerja hendak semenggah, bawalah umat bermusyawarah*". Dalam pespektif *Good Governance*, nilai kemajemukan Budaya Bahari Nusantara; yang

^{*)} Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema "Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 9 November 2011.

memungkinkan masyarakat proaktif dalam pembangunan agaknya setara dengan anasir partisipasi.

Telah jamak diketahui bahwa Melayu itu identik dengan Islam. Budaya Melayu adalah budaya yang sumber dan acuannya bersebuti dengan ajaran Agama Islam. Karenanya Islam tidak dapat dipisahkan dari kemelayuan, bahkan dianggap sebagai “Jati Diri Kemelayuan” seseorang. Nilai inilah berpuncunya nilai-nilai luhur Budaya Melayu (Hasanuddin WS, 2003).. Di dalamnya terhimpun nilai keimanan kepada Allah SWT dan nilai ketaqwaan dalam menjalankan amanah yang dapat menjamin **penegakan hukum** sebagai indikasi terwujudnya *Good Governance*. Amanah dalam Budaya Melayu adalah nilai taat dan setia terhadap sumpah dan janji, dan tata dan setia pula dalam memikul tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan adat mengatakan: “*apabila taat memegang amanah, tegaklah tuah berdiri marwah*”, atau dikatakan: “*tanda orang berbudi pekerti, taat memegang amanah dan janji*” atau “*apabila kerja hendak semenggah, jangan sekali melanggar amanah*”.

Sejarah mencatat bahwa kunci kejayaan kerajaan-kerajaan Melayu Nusantara merupakan andil dari kebudayaannya yang bersifat terbuka. Dengan *keterbukaan* itulah, berbagai unsur positif budaya luar yang mereka cerap dan cerna dapat mempekaya khasanah Budaya Melayu sehingga meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Sifat keterbukaan itu menjadikan mereka dikenal arif dalam menyusun kebijakan pembangunan, berjaya dalam perniagaan, ekonomi, dan sebagainya sehingga mereka mampu mengarungi samudra luas menjalin hubungan dagang dan politik dengan berbilang bangsa. Dari keterbukaan itu pula mereka dikenal bijak dalam menata pemerintahan sehingga kerajaannya tetap berjaya dan berdaulat selama ratusan tahun. Nilai keterbukaan budaya Bahari Nusantara dapat mewujudkan **Transparansi** dalam perpektif *Good Governance*.

Perilaku **Responsif** sebagai cerminan Pelayanan Prima dalam *Good Governance* hanya dimungkinkan oleh aparatur yang berkarakter rendah hati, pemurah, sabar, lapang dada. Sikap ini secara turun temurun dikekalkan dalam Budaya Melayu sebagai jati dirinya. Konon, istilah “Melayu” itu pun berasal dari “melayukan” diri, yakni merendahkan hati, berlaku lemah lembut, dan berbuat ramah tamah (Tennas Effendy, 2004a).

Selalu berupaya *Adil dan Benar* serta *tidak serakah* menjadi sandaran Budaya Melayu yang selalu ditanamkan kepada masyarakatnya, seperti ungkapan adat: “*Adat berlaba sama merasa, adat berezeki sama dibagi*”. Nilai-nilai ini dapat mewujudkan anasir **pemerataan** dalam *Good governance* melalui perencanaan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan aspirasi masyarakat seperti dalam ungkapan: “*Adat merancang sama ditimbang*”.

Merancang dan melaksanakan pembangunan memerlukan wawasan yang luas melebihi luasnya Kepulauan Nusantara serta berpandangan jauh ke depan melampaui jauhnya batas pandang imajiner Wawasan Nusantara. Budaya Melayu sejak dahulu mengajarkan agar anggota masyarakatnya haruslah berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan, agar mereka tidak tergilas oleh perkembangan zaman dan tidak terjebak oleh rancangan yang “asal Jadi” atau terpaku kepada keperluan “semusim”. Sebab itu tidak lah mengherankan kenapa dulu Nenek Moyang kita yang dikenal sebagai Bangsa Pelaut itu mampu menakjubkan manusia sekarang. Mereka mampu mengarungi samudra maha luas dalam zaman yang dianggap kuno, melintasi 10.000 kilometer ke Timur di Lautan Pasifik dan 7000 kilometer ke Barat di Lautan Hindi (Ismail Hussein, 2001). Ungkapan adat mengingatkan: “*Supaya kerja memberi manfaat, jangan sekali berpandangan singkat*” atau dikatakan: “*apabila kerja mau senonoh, layangkan pandangan jauh-jauh*”. **Visi Strategik**

⁷⁾ Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema “Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.

dalam anasir *Good Governanc* diyakini dapat diwujudkan melalui nilai-nilai visional Budaya Bahari Nusantara.

Rancangan dan pelaksanaan pembangunan yang mencerminkan *Good Governance* perlu dilakukan secara teliti, hemat dan cermat sebagai anasir tata pemerintahan yang **Efektif dan efisien**. Ungkapan adat yang memuat nilai-nilai Budaya Melayu: “*Supaya kerja tidak terbuang, hemat berhitung arif membilang*”, atau dikatakan: “*supaya kerja beroleh manfaat, lakukan dengan berhemat cermat*”.

Tidak akan ada **profesionalisme** tanpa ketekunan. Pembangunan tidak dapat dilakukan dengan bermalas-malasan. Kearifan Budaya Melayu mengajarkan: “*Apa tanda Melayu Sejati, bekerja tidak separuh hati*”, atau dikatakan: “*Apa tanda Melayu terbilang, bekerja tidak alang kepalang*”, “*Kalau hidup tak mau lenjin, pertama tekun kedua rajin*”. Bila nilai-nilai luhur Budaya Bahari ini diamalkan secara konsisten, maka profesionalisme para aparatur pemerintahan akan sangat berkesan dalam *Good Governance*. Budaya Melayu juga menjunjung tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Orangtua-tua mengatakan: “*supaya kerja tidak terbengkalai, bekerja jangan memandai-mandai; supaya kerja membawa faedah, bekerja jangan mengada-ada*” atau dikatakan: “*supaya tidak mendapat malu, duduk bertanya tegak berguru*”. Orang professional sangat menghargai waktu. Budaya Melayu mengajarkan agar setiap orang disiplin terhadap waktu dan harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ungkapan adat mengatakan: “*supaya kerja cepat selesai, jangan sekali berlalai-lalai; apabila suka berlengah-lengah, niat tak sampai kerja tak sudah*”, atau dikatakan: “*apabila hidup hendak terpancang, masa yang ada jangan terbuang; apabila hidup hendak terpancang, masa yang ada jangan dibuang; apabila hidup hendak terpuji, bekerja jangan membuang hari*”.

Nilai-nilai Budaya Bahari yang merepresentasikan **akuntabilitas** dalam *Good Governance*, lazim dituangkan dalam ungkapan rasa bertanggungjawab: “*tangan mencencang bahu memikul*” atau sifat Berani “*adat bersumpah pantang dilapah, adat berjanji pantang dimungkiri, adat bekerja pantang bermanja*” dan Tabah “*adat bekerja tahan menderita*”. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar, nilai-nilai tersebut amat diperlukan, terutama dalam memotivasi masyarakat agar mereka ikut bertanggungjawab terhadap pembangunan dan tidak semata-mata menyerahkan tanggungjawab itu kepada pemerintah atau pihak lain.

Budaya Melayu sangat mengutamakan *rasa malu, Tahu diri, Arif dan Bijak*. Dari sifat malu inilah, terbentuknya keperibadian yang terpuji, sehingga merasa “*malu berbuat curang, malu melakukan korupsi, malu menganiaya orang, malu berbuat maksiat, malu bersumpah palsu, malu menistakan orang, malu mencaci maki, malu menghujat, malu menyumpah serapah, malu melempar sepatu dalam majelis, malu memfitnah, malu mencaru-marut, malu berbuat semena-mena, malu memaksakan kehendak*”, dan lain sebagainya. Aktualisasi nilai-nilai Budaya Bahari ini dalam menunaikan amanah pembangunan niscaya dapat mewujudkan **pengawasan** dalam konsepsi *Good Governance*.

Kesemua nilai-nilai luhur dalam Budaya Bahari tersebut tentulah bila disimak, dicerna, dihati, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap Insan Aparatur Pemerintahan, utamanya para perancangan dan pelaksana pembangunan Nasional, akan didukung oleh semua pihak sehingga *Good Governance* dapat diwujudkan bagi kemaslahatan Masyarakat, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia. Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan dan mati hidup sebuah organisasi (Sofian Effendi, 2005). Munculnya Negara-negara yang unggul karena mereka memiliki etos kerja dan spirit yang tinggi, yang selanjutnya menjadi semacam budaya. Bangsa-bangsa tersebut memiliki budaya korporat yang mereka tuangkan dalam visi, misi dan tujuannya. (Taufiq Effendy, 2008). Budaya kerja itu tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus

*) _____
Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema “Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.

diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui suatu proses yang terkendali yang melibatkan semua SDM dalam seperangkat system, sarana, dan teknik-teknik pendukung (Tenas Effendy, 2004b; Gering Supriyadi dan Tri Guno, 2006). Budaya kerja merupakan Kawah Candradimuka untuk merubah cara kerja lama menjadi cara kerja baru yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat. Budaya kerja adalah suatu falsafat yang didasari oleh pandangan hidup manusia terhadap diri dan lingkungannya sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan motivasi, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi prilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapatan, dan tindakan atau bekerja.

BAPPENAS, melalui Tim Pengembangan Kebijakan Nasional menyatakan bahwa "istilah tata pemerintahan yang baik mulai dikenal di tanah air sejak 1997 ketika krisis ekonomi melantak Indonesia dan sejumlah negara di kawan Asia (Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy, 2006). Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan dengan cit-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen kuat, daya tahan, dan waktu yang tidak singkat karena diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai tata pemerintahan yang baik secara utuh oleh seluruh komponen Bangsa termasuk oleh Aparatur Pemerintahan dan masyarakat luas. Disamping itu, perlu adanya kesepakatan bersama antara rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen Bangsa bahwa penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi pencapaian masa depan bangsa dan Negara yang lebih baik.

Dari nilai-nilai Budaya Bahari Nusantara itu dapat dibuktikan bahwa budaya Melayu mengutamakan persatuan dan kesatuan atau persebatian antar sesama anggota masyarakat tanpa memandang asal-usulnya. Ungkapan yang sering didengar, "*Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, Ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun, Berat sama dipikul ringan sama dijinjing*". Selain itu, ada nilai kebersamaan, rasa kasih mengasih, dan saling bertenggang rasa yang terkenal melalui ungkapan: "*Setikat sebantal tidur, Sepiring sepinggan makan, Seanak sekemenakan, senenak dan semamak, Seadat dan sepusaka, Makan tidak menghabiskan minum tidak mengeringkan*".

Para penyelenggara Negara diharapkan mampu mengerti bahwa kebudayaan bukan sub-ordinat pembangunan, tetapi sebagai ordinat. Pemahaman kebudayaan sebagai ordinat itu perlu diaktualisasikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan Negara, termasuk dalam upaya mewujudkan Good Governance. Dunia pendidikan diharapkan dapat mengangkat dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bahari tersebut melalui proses pembelajaran yang berkesan.

PENUTUP

Nilai-nilai Budaya Bahari memiliki kesetaraan dengan Anasir-anasir dalam *Good Governance*. Dari petikan latar belakang sejarah kebudayaan bahari Nusantara, dapat disimpulkan bahwa para pendahulu kita telah banyak mewariskan konsepsi, pengalaman, cita-cita, dan semangat perjuangan bagi kita semua, terutama dalam mewujudkan kemakmuran serta kejayaan bangsa melalui bahari. Walaupun demikian, upaya-upaya pada tataran "*political will*" tersebut masih belum optimal dirasakan sebagai suatu komitmen nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu tantangan kita bersama ke depan adalah bagaimana berupaya terus menggali kearifan dan kebesaran

*)
Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema "Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.

nilai-nilai budaya bahari tersebut dan membuatnya mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Upaya Revitalisasi terhadap nilai-nilai Budaya Bahari Nusantara secara realistis dapat dikembangkan dalam upaya membangun *Good Governance* bila diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini dimungkinkan karena nilai-nilai tersebut sesungguhnya telah bersebat dalam diri Anak Bangsa di Kepulauan Nusantara. Ianya sangat krusial dan strategis dari perspektif membangun Modal Sosial (*Social Capital*) sebagai upaya akseleratif terwujudnya *Good Governance*. Nilai-nilai luhur Budaya Bahari Nusantara diyakini dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta tumpuan masa depan demi kesejahteraan bersama Bangsa dan Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian B. Lapitan. (2008). *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke- 16 dan 17*. Komunitas Bambu, Depok. Jakarta.
- Bambang Budi Utomo. (2007). *Pemaknaan indonesia raya dalam konteks kekinian*. Makalah Yang Dipresentasikan Dalam Seminar Kontroversi Lagu Indonesia Raya, Jakarta 24 Agustus 2007.
- Djoko B. (2008). *Togog Menggugat Negeri Maling; Kisah-kisah Inspiratif Sarat Makna untuk Membangun Bangsa*. rumah.tumbuh Publishing. Surakarta.
- Djoko Pramono. (2005). *Budaya Bahari*. Gramedia, Jakarta.
- Gering Supriyadi dan Tri Guno. (2006). *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah; Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- H.S. Umar. (1986). Nelayan, Petani dan Priyayi Melayu di Riau. Dalam Muchtar Lutfi (Ed). *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, pp. 539- 550. Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Hasanuddin WS. (2003). *Pemeliharaan dan Pengembangan Budaya Melayu*. Dalam Kumpulan Makalah Seminar Budaya Melayu Sedunia 2003, pp.122-131. Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.,
- Husni Thamrin. (2003). *Problematika Masyarakat dan Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara*. Dalam Kumpulan Makalah Seminar Budaya Melayu Sedunia 2003, pp.249-272. Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Ismail Hussein. (2001). *Antara Dunia Melayu dan Dunia Kebangsaan*. Dalam Ismail Hussein, Wan Hashim Wan The, dan Ghazali Shafie (Eds.). *Tamadun Melayu Menyongsong Abad Kedua Puluh Satu*, pp. 10-44. Penerbit UKM, Malaysia.
- Jujun S. Suriasumantri. (2000) *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta
- Koentjaraningrat. (1986) *Bahasa Melayu, Bahasa Nasional, dan Bahasa Jawa*. Dalam Muchtar Lutfi (Ed). *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, pp. 9-16. Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Muchtar Ahmad. (1986). *Teknologi Bahari dalam Masyarakat Riau*. Dalam Muchtar Lutfi (Ed). *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, pp. 203-210. Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Muchtar Ahmad. (2004). *Kembali ke Puncak; Kebudayaan Melayu dalam Cabaran Masa Depan*. Unri Press, Pekanbaru.

*)
Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema "Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 9 November 2011.

- Muhammad Ray Akbar. (2008). *Mengapa Harus Korupsi?* AKBAR. Jakarta
- Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy. (2006). *Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia; Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Sofian Effendi. (2005). *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005, Jakarta.
- Suka Hardjana. (2008). *Jas Wakil Rakyat dan Tiga Kera; Percikan Kebijakan*. KOMPAS. Jakarta.
- Suwardi MS. (2003). *Budaya Melayu dalam Citra Tamadun Bahari*. Dalam Kumpulan Makalah Seminar Budaya Melayu Sedunia 2003, pp.35-45. Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Suwardi MS. (2008). *Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tenas Effendy. (2000). *Peranan Budaya dalam Pembangunan*. Pekanbaru (Tidak diterbitkan)
- Tenas Effendy. (2003). *Nilai-nilai Asas Pesebatian Melayu*. Pekanbaru (Tidak diterbitkan).
- Tenas Effendy. (2004a). *Tunjuk Ajar Melayu; Nutir-butir Budaya Melayu Riau*. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Penerbit AdiCita, Yogyakarta.
- Tenas Effendy. (2004b). *Ethos Kerja*. Unri Press. Pekanbaru .

TENTANG PEMAKALAH

Firdaus L.N. adalah Dosen tetap pada Program *Studi Pendidikan Biologi*, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sejak 1 Maret 1989-sekarang. Akademisi yang lahir di *Dabosingkep, Kabupaten Lingga* 21 Mei 1964 ini meraih Sarjana Pendidikan Biologi (**Drs.**) di fakultas yang sama (1988) dengan predikat *Cum Laude* dan mengantarkannya sebagai lulusan *Pemuncak* pada Wisuda Sarjana Unri ke 29 pada tanggal 3 September 1988. Gelar Magister Sains (**M.Si.**) dalam Ekofisiologi Tumbuhan diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada (1 Februari 1995) dan *Doctor of Phylosophy (Ph.D)* dari *Ecole National Superieure Agronomique (ENSA)Montpellier-Perancis* (13 September 2001). Puncak karier akademiknya ditandai dengan pemerolehan Jabatan fungsional dosen tertinggi sebagai Guru Besar (**Profesor**) dalam Bidang Ilmu Ekofisiologi tumbuhan dalam usia 43 tahun, terhitung sejak 1 April 2007 yang dikukuhkan pada tanggal 5 September 2007. Tahun 2009 dia mencatatkan diri sebagai Alumni PPSA XVI Lemhannas RI.

*)
Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2011 dengan Tema "Melalui Hari Nusantara Kita Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan Negara Republik Indonesia: di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 9 November 2011.